

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan adanya perubahan masa dari orde baru ke era reformasi sangat memberikan dampak yang positif bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Adapun perubahan paradigma baru ini diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, pemerintah daerah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas baik. Untuk dapat mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) pemerintah harus melakukan berbagai upaya-upaya yang dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup beberapa aspek baik dalam bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan sumber daya manusia. Pengukuran kinerja yang berbasis akuntabilitas serta transparansi dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat (Halim dan Laurensius 2015). Untuk mengelola pemerintahan daerah benar, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya.

Bentuk media pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 31 disebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian serta pengambilan keputusan, harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan.

Informasi akuntansi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya bermanfaat baik dalam pengertian, aktivitas yang dapat bermanfaat baik dalam pengambilan sebuah keputusan dan dapat dipahami oleh para pengguna (Huang *et al*, 1999 dalam Xu *et al*, 2003). Agar bermanfaat, informasi akuntansi harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yakni (1) Relevan, (2) Andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi atau sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif

laporan keuangan pemerintah seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengamanatkan kepada pemerintah untuk menciptakan laporan keuangan sesuai dengan karakteristik kualitatif yang telah dijelaskan diatas. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat pertanggungjawaban manajemen suatu pemerintah terhadap publik. Penerapan akuntansi yang baik serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pada sebuah instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberi opini jenis ini, artinya auditor berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah/ dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. <https://id.wikipedia.org/Opini.BPK>.

SAP merupakan salah satu acuan dalam menyusun laporan keuangan. SAP merupakan landasan dasar yang penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap SAP, maka akan dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan

Keuangan. Laporan keuangan yang relevan dan handal serta berguna dalam menentukan keputusan. Standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010).

Dalam penyusunan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataan tidak semua pegawai di pemerintahan memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut.

Selain penerapan SAP, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi dalam kaitannya pengelolaan keuangan daerah yaitu

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (www.djkd.kemendagri.go.id).

Pemerintah Kota Denpasar adalah salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sejak pertengahan tahun 2010 dengan tahap penyesuaian yang sebelumnya sudah lebih dahulu menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Untuk keseragaman pengelolaan keuangan daerah maka SIMDA digantikan menjadi SIPKD. Setelah tahap penyesuaian penerapan SIPKD pada Pemerintah Kota Denpasar baru digunakan pada awal bulan Januari 2011 dan diterapkan oleh 34 SKPD di Pemerintah Kota Denpasar. Pengolahan data keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar diharapkan akan berjalan efektif apabila mempertimbangkan elemen-elemen penting dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah seperti keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan/output dan relevansi. Diharapkan dengan efektifnya penerapan SIPKD maka kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan opini BPK pada tanggal 25 Mei 2012 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar tahun 2011 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 06.A/BPK.DPS/05/2012. Selanjutnya opini BPK pada tanggal 30 Mei 2013 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar tahun 2012 mengalami peningkatan opini yaitu dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai LHP No 04.A/LHP/XIX.DPS/05/2013. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar (Aryanta, 2011). Hal ini menjadi suatu kemajuan akan kinerja instansi di Pemerintah Kota Denpasar karena menunjukkan bahwa dalam penyajian Laporan Keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Perundang-undangan yang berlaku serta disajikan secara andal dan tepat waktu.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pernyataan pro-kontra mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terus timbul. Hal menonjol yang terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan Pemerintah. Hal ini meliputi kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas, khususnya

sumber daya manusia di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan karena penempatan posisi pegawai di pemerintah Kota Denpasar belum dilakukan sesuai bidang keahlian, dimana masih banyak pegawai yang ditempatkan dibagian akuntansi dan pelaporan keuangan tidak berlatar belakang pendidikan formal akuntansi dan keuangan.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia khususnya Pemerintah Kota Denpasar merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Khususnya sumber daya manusia di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal ini terjadi karena pegawai di pemerintah Kota Denpasar belum ditempatkan sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah Kota Denpasar yaitu tentang penerapan teknologi informasi yang belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh pegawai pemerintah Kota Denpasar. Seperti yang terjadi pada Pemerintah Kota Denpasar per tgl 31 Desember 2013 LKPD Kota Denpasar diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK RI, tetapi ini bukan berarti tidak ada permasalahan yang ditemukan. Terdapat kelemahan dalam mentaati peraturan perundang-undangan dan SPI yang ditemukan oleh BPK. Tetapi kelemahan yang ditemukan BPK tidak cukup material (denpasar.bpk.go.id).

Berlandaskan PP No. 8 Tahun 2006 laporan keuangan yaitu suatu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan Negara atau daerah selama suatu periode. LKPD yang baik dan memuat informasi yang berkualitas akan membuktikan bahwa pemerintah telah dapat mengikuti ketentuan ataupun prosedur untuk melaporkan laporan keuangan yang patut dengan ketentuan

yang berlaku sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Maka dari itu sangat penting untuk membuat, menyusun, menyajikan, dan melaporkan laporan keuangan yang efektif, efisien, dan berkualitas. BPK dalam menilai hal tersebut dapat dinyatakan dalam 4 jenis opini yakni WTP, WDP, TMP dan TW (Setiawan dan Gayatri, 2017).

Fakta yang ada di lapangan yaitu masih adanya LKPD yang belum mampu mencapai opini WTP dan masih banyak ditemukan persoalan mengenai ketaatan terhadap perundang-undangan serta SPI. Diantara pemerintah daerah yang ada, pemerintah Provinsi Bali salah satu yang masih mencapai penilaian WTP atas LKPD. Selama enam tahun berturut-turut dari tahun 2013-2018 Pemerintah Provinsi Bali mampu mempertahankan opini WTP atas LKPD. Penilaian yang diberikan BPK membuktikan jika LKPD Provinsi Bali sudah disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana sebelumnya LKPD Provinsi Bali tahun 2012 memperoleh opini WDP. Ini membuktikan jika kualitas LKPD pemerintah Provinsi Bali belum sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun 2012. Para pemangku kepentingan akan percaya atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah melalui opini yang diberikan oleh BPK (Kiranayanti dkk., 2016). Walaupun Pemerintah Provinsi Bali mampu meraih opini WTP, disisi lain predikat WTP yang diperoleh masih terdapat catatan dari BPK yang direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk segera diperbaiki. LKPD Provinsi Bali tahun 2018 dilakukan pemeriksaan oleh BPK, adapun temuan BPK atas LKPD Provinsi Bali yaitu menemukan adanya: 1) Penatausahaan Aset Tetap dan Aset lainnya belum sepenuhnya memadai, 2)

Pengelolaan belanja hibah TA 2018 belum seutuhnya memadai, dan 3) Pengelolaan dana bos pada SMA/SMKN/SLB TA 2018 belum seutuhnya sesuai ketentuan (BPK, 2019). Selain itu pada LKPD Provinsi Bali tahun sebelumnya yaitu pada tahun anggaran 2017, adapun temuan BPK yaitu sebagai berikut: 1) Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali pada PT Mergantaka Mandala belum jelas, 2) Pemungutan pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya tertib, 3) Peraturan gubernur tentang standar harga satuan provinsi belum mengatur besaran standar harga sewa kendaraan, dan 4) Penatausahaan aset tetap pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memadai (BPK, 2018). Walaupun pemerintah Provinsi Bali memperoleh opini WTP, di lain pihak perlu adanya peningkatan serta perbaikan yang harus dilakukan. Penilaian WTP yang diperoleh akan lebih berkualitas, jika tidak ada catatan dan temuan beberapa permasalahan. Permasalahan kelemahan yang lebih terkait ke SPI di atas tersebut umumnya dapat terjadi salah satunya karena belum optimalnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, belum maksimalnya SDM dalam mengerti akuntansi, dan sistem yang digunakan belum maksimal diterapkan.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan sebelumnya telah banyak dilakukan akan tetapi masih terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian. Penelitian oleh Pujanira dan Wijayanti (2017) serta Rahmawati dkk (2018) yang menunjukkan hasil Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, berbeda dengan hasil penelitian Pasha (2018) serta Ningsih (2017) yang menunjukkan hasil Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak

berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian Pujanira dan Wijayanti (2017) serta Rahmah (2018) yang menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, berbeda dengan hasil penelitian Pasha (2018) yang menunjukkan hasil Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Denpasar Periode 2018-2020.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar periode 2018-2020?
2. Apakah penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar periode 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi dalam penelitian di bidang kualitas laporan keuangan khususnya dalam peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar.
- b. Penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), dan kualitas laporan keuangan.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah.

- b. Bagi Pembaca

Penelitian ini akan memberikan suatu gambaran yang jelas akan pentingnya kita mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Melalui penelitian ini diharapkan pembaca dapat memperoleh masukan yang berarti dalam menangani masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan.

1.4.3 Bagi Lembaga Pendidikan / Universitas

Sebagai sumbangan kepastakaan serta referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Teori Technology Acceptance Model (TAM)*

Teori Technology Acceptance Model (TAM) adalah teori yang menjelaskan minat dalam penggunaan teknologi informasi. Teori ini dikemukakan oleh Davis (1989) dan kemudian digunakan oleh beberapa peneliti lain. Teori TAM menjelaskan dua faktor yaitu kegunaan persepsi, yang didefinisikan sebagai tingkat dimana orang berfikir bahwa menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya. Model TAM dilandasi oleh Theory Of Reasoned Action (TRA) Fesbein, 1980. Sistem informasi tidak akan menghasilkan informasi bagi organisasi atau perusahaan apabila tidak ada pengguna yang memakai sistem tersebut. keterlibatan pengguna merupakan partisipasi dalam proses pengembangan sistem oleh anggota organisasi atau anggota dari kelompok pengguna target.

Proses pengguna sistem informasi akuntansi yang melibatkan pengguna akan menimbulkan keinginan untuk menggunakan sistem informasi akuntansi sehingga pengguna merasa memiliki sistem informasi akuntansi dan kinerja sistem informasi akuntansi yang diukur menggunakan kepuasan dan juga meningkat. Mardi (2016) percaya bahwa sistem informasi akuntansi adalah kegiatan yang komprehensif , menghasilkan laporan dalam bentuk data dan transaksi bisnis, dan memproses dan menyajikannya, sehingga menjadikan laporan keuangan yang bermakna bagi mereka yang membutuhkan. 7 Konstruk

kedua TAM adalah persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dari usaha. Berdasarkan definisinya, diketahui bahwa konstruk persepsi kemudahan pengguna ini juga merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. (Jogiyanto, 2007 Dalam Prasetya, 2014). Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari dua prosedur dan juga data keuangan yang saling berhubungan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang terpercaya dan kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan dari pihak internal maupun eksternal.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010:10) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam

informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan material, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Dalam PP Nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBK berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membuat perubahan hebat terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP menggunakan basis akrual untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana. Sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas, kas menuju akrual sampai basis akrual.

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemahaman SAP merupakan suatu pengetahuan yang sangat mendasar dalam menyusun pelaporan keuangan. Dimana dengan adanya pemahaman yang baik maka akan berdampak terhadap kualitas pelaporan keuangan yang baik pula, serta berpengaruh terhadap kinerja suatu pelaporan keuangan daerah.

2.1.3 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitas dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundangundangan. Penyelenggaraan SIPKD dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah.

SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penyelenggaraan SIPKD difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri. SIPKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah disebut dengan SIPKD Nasional. Pemerintah menyelenggarakan SIPKD secara nasional dengan tujuan:

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional
2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Pujanira (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian bahwa Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah semua variabel ini berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rahmawati dkk (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Tangerang Selatan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas laporan keuangan skpd kota tangerang selatan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern semua variabel ini berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan skpd kota tangerang selatan

Sako (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Menyimpulkan bahwa

penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Wulandari (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda. Menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Febri dkk (2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi, Kompetensi SDM, dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi, Kompetensi SDM, dan SPIP, Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan analisis jalur. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi dan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Wijayanti (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Efektifitas Penerapan Sipkd, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan, Penerapan Sipip, Dan Standar Akuntansi Pemerintahan

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Efektifitas Penerapan Sipkd, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan, Penerapan Spip, Dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda. Menyimpulkan bahwa Efektivitas penerapan SIPKD dan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan, Penerapan Spip tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pasha (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Staf Akuntansi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sugiarto (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Pengendalian Internal. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Ningsih (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap), Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Rahmah (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

